

Peran Tarekat Dalam Dinamika Politik

Firmansyah¹, Rahmi Damis², Afifuddin Haritsah³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, firmanbima227@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, rahmi.damis@uin-alauddin.ac.id,

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, afifuddin.harisah@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Sufi Order, Political Dynamics,
Charismatic Authority,
Transnational Network,
Electoral*

Article history:

Received 12-05-2026

Revised 20-05-2026

Accepted 23-05-2026

ABSTRACT

Historically recognized as a spiritual institution focusing on the purification of the soul (*tazkiyatun nafs*), the tarekat (sufi order) has evolved into a socio-political entity due to the strong charismatic authority of the mursyid (spiritual master) and patron-client relationships with the congregation. This dynamic creates massive social capital that attracts the attention of political elites looking to utilize it as a strategic tool for electoral victory. This study aims to comprehensively examine the mapping of the sufi order's political dynamics, the resulting impacts of political involvement, and the manifestations of the spiritual institution's strategic role on the socio-political stage. The research method employed is qualitative library research, in which a critical analysis is conducted on secondary data consisting of fundamental books, academic journals, and relevant historical documents. The results of the study indicate that the interaction between sufi orders and modern politics creates a space for symbiotic-mutualistic negotiations, where the loyalty of the congregation is exchanged for legal protection, logistics, or policy access. This political involvement carries a dual impact: externally and positively, it enhances the collective political bargaining position of the Muslim community and educates civil participation; however, internally and negatively, it risks degrading the ascetic values of the tarekat and triggering fragmentation as well as polarization among the congregation due to differing political choices. The manifestation of the sufi order's role proves to be central, acting both as an effective vote-gathering machine (vote getter) through the obedience of the baiat (allegiance oath) and as a provider of moral and religio-political legitimacy for candidates. This study concludes that the political resilience of the sufi order in the contemporary era is heavily supported by a geographically cross-border transnational network that functions as an informal diplomatic shield, enabling the tarekat to remain adaptive in maintaining its autonomy amid modernization.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Firmansyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, firmanbima227@gmail.com

PENDAHULUAN

Tarekat secara historis dikenal sebagai institusi spiritual dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan kedekatan kepada Allah SWT. Namun, dalam perkembangannya, tarekat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan politik yang melingkupinya. Keberadaan guru mursyid yang memiliki otoritas

karismatik mutlak menciptakan ikatan patron-klien yang sangat kuat dengan para pengikutnya.¹ Hubungan sosiologis ini mengubah tarekat dari sekadar ruang asketis menjadi sebuah entitas sosiopolitik yang memiliki basis massa solid dan terorganisir. Dalam konteks modern, struktur sosial tarekat yang hierarkis dan loyalitas jemaah yang tinggi sering kali menjadi daya tarik utama bagi para aktor politik untuk menjadikannya sebagai instrumen strategis dalam meraih maupun mempertahankan kekuasaan.²

Keterlibatan tarekat dalam panggung politik melahirkan dinamika politik yang kompleks dan fluktuatif. Dinamika ini umumnya dicirikan oleh hubungan simbiotis mutualisme atau bahkan ketegangan antara otoritas spiritual dan otoritas profan (penguasa). Di satu sisi, elite politik membutuhkan legitimasi keagamaan dan dukungan suara dari tarekat; di sisi lain, tarekat memerlukan perlindungan politik dan akses sumber daya untuk menjaga eksistensi serta memperluas pengaruhnya.³ Dinamika politik ini semakin intensif terjadi menjelang momentum kontestasi elektoral, seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, di mana ruang-ruang spiritual kerap bertransformasi menjadi ruang negosiasi dan transaksi politik yang dinamis.⁴

Interaksi yang intens antara tarekat dan dunia politik ini secara tidak langsung membawa dampak yang signifikan terhadap tatanan internal tarekat maupun eksternal masyarakat. Secara positif, keterlibatan politik tarekat dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) umat Islam dalam kebijakan publik serta mengedukasi jemaah mengenai pentingnya partisipasi sipil.⁵ Namun, dampak negatif yang tidak dapat dihindari adalah munculnya potensi polarisasi dan fragmentasi di tingkat akar rumput ketika terjadi perbedaan pilihan politik, serta risiko degradasi nilai-nilai spiritual ketika tarekat terjebak dalam politik praktis-pragmatis yang koruptif.⁶

Dalam pusaran dinamika tersebut, peran tarekat menjadi sangat sentral dan multifaset. Tarekat tidak lagi bertindak sebagai penonton pasif, melainkan sebagai aktor strategis. Peran utama tarekat sering kali mewujudkan sebagai mobilisator massa (*vote getter*) yang efektif karena kepatuhan jemaah kepada arahan politik sang

¹ Bruinessen, M. van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*. Mizan. (1992), hal. 15.

² Muhtadi, B. *Populisme Islam dan Elektoralisme: Dinamika Politik Kontemporer di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. (2020), hal. 84.

³ Mulyati, S. *Peran Tarekat dalam Kelangsungan Hidup Masyarakat Kontemporer*. Kencana. (2010), hal. 42.

⁴ Woodward, M. *Java, Indonesia and Islam*. Springer. (2011), hal. 118.

⁵ Turmudi, E. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. ANU E Press. (2006), hal. 73.

⁶ Howell, J. D. *Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New New Age*. Dalam G. Fealy & S. White (Ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS Publishing. (2007), hal. 221.

mursyid (Bruinessen). Selain itu, tarekat berperan sebagai penyedia legitimasi moral dan religio-politik yang mampu mendongkrak citra kesalehan para politisi di mata publik.⁷ Melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dinamika politik tarekat dipetakan, apa saja dampak yang ditimbulkannya, serta bagaimana manifestasi peran tarekat tersebut dijalankan dalam panggung sosiopolitik.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai "Peran Tarekat Dalam Dinamika Politik" ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dicirikan sebagai suatu metode yang berfokus pada pengumpulan, telaah, dan analisis kritis terhadap literatur atau data teks tertulis yang relevan tanpa memerlukan pengamatan langsung di lapangan.⁸ Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada pelacakan dokumen historis, pemikiran para ahli, jurnal ilmiah, dan laporan riset terdahulu mengenai interaksi antara institusi spiritual (tarekat) dan struktur kekuasaan (politik). Melalui studi literatur, peneliti dapat memetakan peta konseptual, tipologi relasi patron-klien, dan pola gerakan politik tarekat secara mendalam dari berbagai lokus dan garis waktu yang berbeda.

Sesuai dengan karakteristik riset kepustakaan, data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang dikelompokkan ke dalam dua kategori.⁹ Pertama, sumber data primer dari kepustakaan yang membahas tentang dinamika politik dan peran tarekat serta buku fundamental yang ditulis oleh para sosiolog dan sejarawan politik Islam. Kedua, sumber data sekunder pendukung yang mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, tesis, disertasi, prosiding seminar, serta laporan berita investigatif yang mendokumentasikan keterivatan tarekat tertentu dalam momentum pemilihan umum atau pergeseran kebijakan politik nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Dinamika Politik Tarekat: Transisi Ruang Spiritual ke Arena Negosiasi

Berdasarkan hasil penelaahan pustaka, dinamika interaksi antara tarekat dan dunia politik modern menunjukkan adanya pergeseran sosiologis yang sangat dinamis. Struktur internal tarekat yang menempatkan mursyid sebagai pemegang otoritas karismatik mutlak secara alamiah bertransformasi menjadi modal politik yang sangat berharga dalam sistem demokrasi elektoral. Hubungan patron-klien

⁷ Muhtadi, B. *Populisme Islam dan Elektoralisme: Dinamika Politik Kontemporer di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. (2020), hal. 89.

⁸ Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. (2004), hal. 3-5.

⁹ Suryabrata, S. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. (2014), hal. 39-41.

yang awalnya bersifat asketis-spiritual kini kerap meluas menjadi jaringan instruksi sosial yang terorganisir.¹⁰ Elite politik melihat jaringan ini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan basis dukungan yang masif, loyal, dan efisien. Secara teoretis, sosiologi Islam memandang bahwa struktur kepemimpinan sufi yang terpusat memiliki daya kohesi sosial yang jauh lebih tangguh dibandingkan institusi sosial-keagamaan biasa ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan profan.¹¹

Sebaliknya, institusi tarekat juga memanfaatkan momentum kontestasi kekuasaan untuk melakukan tawar-menawar strategis. Dinamika ini umumnya mewujud dalam hubungan simbiotis-mutualisme, di mana ruang-ruang sakral seperti pesantren atau tempat perjumpaan zikir bersama (*halaqah*) bertransformasi menjadi ruang negosiasi dan transaksi politik.¹² Kompensasi politik yang diperoleh tarekat biasanya berupa jaminan perlindungan hukum bagi aktivitas keagamaan mereka, bantuan finansial untuk pembangunan infrastruktur fisik lembaga spiritual, hingga akses terhadap kebijakan publik tertentu yang menguntungkan eksistensi jaringan mereka.¹³ Lebih jauh, adaptasi tarekat perkotaan (*urban sufism*) memperlihatkan bahwa arena negosiasi ini tidak lagi terbatas di pedesaan, melainkan merambah ke lingkaran elite birokrasi kelas menengah atas yang mencari legitimasi kultural serta ketenangan batin di tengah kompetisi sekuler.¹⁴

Dampak Keterlibatan Politik Tarekat terhadap Internal Jemaah dan Eksternal Masyarakat

Keterlibatan aktif tarekat dalam ranah politik praktis memunculkan konsekuensi ganda yang memengaruhi tatanan internal jemaah maupun kehidupan bermasyarakat luas. Pada dimensi eksternal-positif, keterlibatan politik ini mampu menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) kolektif umat Islam dalam merumuskan atau memengaruhi arah kebijakan publik nasional maupun lokal.¹⁵ Saluran komunikasi politik yang terbuka antara mursyid dan penguasa memberikan kesempatan bagi aspirasi umat untuk diserap langsung oleh pembuat kebijakan. Selain itu, momentum politik ini dapat berfungsi sebagai sarana edukasi politik bagi warga jemaah agar melek terhadap hak sipil mereka.

¹⁰ Bruinessen, M. van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*. Mizan. (1992), hal. 15-20.

¹¹ Gellner, E. *Muslim Society*. Cambridge University Press. (1981), hal. 48-52.

¹² Woodward, M. *Java, Indonesia and Islam*. Springer. (2011), hal. 118-125.

¹³ Mulyati, S. *Peran Tarekat dalam Kelangsungan Hidup Masyarakat Kontemporer*. Kencana. (2010), hal. 42-47.

¹⁴ Howell, J. D. Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New New Age. Dalam G. Fealy & S. White (Ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS Publishing. (2007), hal. 224-228.

¹⁵ Turmudi, E. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. ANU E Press. (2006), hal. 73-78.

Namun, dinamika ini membawa dampak negatif signifikan di tingkat internal. Ketika elite tarekat atau mursyid terjebak dalam kepentingan politik praktis yang bersifat pragmatis-koruptif, terjadi risiko degradasi dan desakralisasi terhadap nilai-nilai spiritual luhur yang menjadi fondasi utama tarekat.¹⁶ Lebih jauh, pergeseran kepemimpinan dari model karismatik murni ke model legal-rasional akibat infiltrasi partai politik sering kali memicu konflik internal.¹⁷ Perbedaan pilihan politik atau pergeseran arah dukungan di tingkat elite tarekat juga rentan memicu friksi sosial, polarisasi akut, hingga fragmentasi kelompok di tingkat akar rumput jemaah.

Manifestasi Peran Sentral Tarekat dalam Panggung Sosiopolitik

Dalam pusaran kontestasi kekuasaan, tarekat menjelma sebagai aktor strategis melalui dua peran utama yang sangat sentral. Pertama, tarekat bertindak sebagai mobilisator massa atau mesin pengumpul suara (*vote getter*) yang sangat efektif dalam pemilu.¹⁸ Kepatuhan jemaah yang bersumber dari sumpah setia (*baiat*) membuat instruksi atau arahan politik dari mursyid cenderung diikuti tanpa resistensi ideologis.

Kedua, tarekat berfungsi sebagai penyedia legitimasi moral dan religio-politik bagi para kandidat. Di tengah menguatnya tren populisme Islam dan elektoralisme, para politisi profan sangat membutuhkan simbol kesalehan demi mendongkrak citra moral mereka di mata publik.¹⁹ Kehadiran politisi di tengah majelis zikir atau restu terbuka dari seorang mursyid secara instan mampu menepis isu-isu negatif sekaligus meyakinkan pemilih muslim tradisional bahwa kandidat tersebut memiliki kedekatan spiritual dengan ulama. Pola mobilisasi ini membuktikan bahwa modal spiritual dapat dengan mudah dikonversi menjadi modal elektoral yang konkret di bilik suara.

Jaringan Transnasional dan Resiliensi Politik Kontemporer

Analisis kepustakaan juga mendapati bahwa resiliensi politik tarekat ditopang oleh karakternya yang bersifat transnasional dan lintas geografis. Jaringan tarekat seperti Naqsyabandiyah atau Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah tidak beroperasi secara lokal semata, melainkan terhubung dengan pusat-pusat spiritual di Timur Tengah dan Asia Selatan.²⁰ Konektivitas transnasional ini memberikan legitimasi keagamaan

¹⁶ Howell, J. D. *Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New New Age*. Dalam G. Fealy & S. White (Ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS Publishing. (2007), hal. 231-235.

¹⁷ Turmudi, E. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. ANU E Press. (2006), hal. 81-85.

¹⁸ Bruinessen, M. van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*. Mizan. (1992), hal. 22-26.

¹⁹ Muhtadi, B. *Populisme Islam dan Elektoralisme: Dinamika Politik Kontemporer di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. (2020), hal. 84-94.

²⁰ Bruinessen, M. van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*. Mizan. (1992), hal. 28-32.

berlapis bagi mursyid lokal, menjadikannya figur yang disegani tidak hanya oleh jemaah, tetapi juga oleh penguasa negara.²¹

Secara historis, kontinuitas dan perubahan gerakan sufi dalam panggung politik global menunjukkan bahwa institusi ini selalu berhasil selamat dari tekanan politik berbagai rezim karena kelenturan organisasinya.²² Ketika menghadapi tekanan politik dari rezim tertentu, kekuatan jaringan internasional ini berfungsi sebagai perisai diplomatik informal. Kemampuan tarekat dalam mempertahankan otonomi keagamaan sembari tetap adaptif menavigasi gelombang modernisasi dan globalisasi menunjukkan bahwa institusi ini memiliki daya tahan politik (*political resilience*) yang luar biasa kokoh dalam konjungtur politik kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara tarekat dan dunia politik modern telah menggeser fungsi institusi spiritual ini menjadi entitas sosiopolitik yang sangat dinamis. Struktur otoritas karismatik mursyid yang mutlak serta ikatan patron-klien yang kuat secara alamiah bertransformasi menjadi modal politik elektoral yang bernilai tinggi. Dinamika ini memicu lahirnya hubungan simbiotis-mutualisme di mana ruang-ruang sakral, seperti pesantren dan (halaqah) zikir, kini bertransformasi menjadi arena negosiasi strategis. Dalam ruang tersebut, basis massa tarekat yang solid ditukar dengan kompensasi profan berupa perlindungan hukum, bantuan finansial, atau akses terhadap kebijakan publik yang menguntungkan eksistensi mereka, sebuah fenomena yang hari ini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga merambah kawasan perkotaan melalui gejala (urban sufism).

Di sisi lain, keterlibatan tarekat dalam politik praktis membawa konsekuensi ganda atau dampak bifurkatif yang signifikan. Pada dimensi eksternal-positif, keterlibatan ini mampu mendongkrak posisi tawar kolektif umat Islam dalam perumusan kebijakan publik serta menjadi sarana edukasi sipil jemaah agar melekat politik. Namun secara internal-negatif, infiltrasi kepentingan politik pragmatis-koruptif sangat berisiko mendegradasi nilai-nilai spiritual luhur tarekat, mengubah model kepemimpinan karismatik menjadi legal-rasional yang memicu konflik struktural, serta melahirkan polarisasi sosial dan fragmentasi yang akut di tingkat akar rumput Jemaah.

Dalam panggung sosiopolitik kontemporer, peran sentral tarekat akhirnya termanifestasi nyata ke dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai mobilisator massa yang efektif berkat kepatuhan (baiat) jemaah, dan sebagai penyedia legitimasi moral religio-politik yang mampu mengonversi kesalehan spiritual menjadi modal elektoral

²¹ Woodward, M. *Java, Indonesia and Islam*. Springer. (2011), hal. 130-134.

²² Voll, J. O. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Syracuse University Press. (1994), hal. 85-92.

konkret di bilik suara demi mendongkrak citra para politisi di tengah tren populisme Islam. Pada akhirnya, seluruh dinamika dan resiliensi politik tarekat ini mampu bertahan dan teguh menghadapi tekanan berbagai rezim karena ditopang oleh strukturnya yang bersifat transnasional. Jaringan lintas geografis global ini tidak hanya memberikan legitimasi keagamaan berlapis bagi mursyid lokal, tetapi juga berfungsi sebagai perisai diplomatik informal yang menjaga otonomi serta daya tahan politik (political resilience) tarekat dalam konjungtur politik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, M. van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*. Mizan. 1992.
- Gellner, E. *Muslim Society*. Cambridge University Press. 1981.
- Homans, G. C. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. Harcourt, Brace & World. 1961.
- Howell, J. D. Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New New Age. Dalam G. Fealy & S. White (Ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS Publishing. 2007.
- Muhtadi, B. *Populisme Islam dan Elektoralisme: Dinamika Politik Kontemporer di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. 2020.
- Mulyati, S. *Peran Tarekat dalam Kelangsungan Hidup Masyarakat Kontemporer*. Kencana. 2010.
- Putnam, R. D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. 1993.
- Scott, J. C. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*. 1972.
- Suryabrata, S. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. 2014.
- Turmudi, E. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. ANU E Press. 2006.
- Voll, J. O. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Syracuse University Press. 1994.
- Weber, M. *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press. 1947.
- Woodward, M. *Java, Indonesia and Islam*. Springer. 2011.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. 2004.